

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN**

SKRIPSI



Oleh

SITI KHOIRIYAH
NIM : 18520048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun)



Oleh

SITI KHOIRIYAH

NIM : 18520048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun)



Oleh

SITI KHOIRIYAH

NIM : 18520048

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI
KASUS PADA KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN)

O l e h

SITI KHOIRIYAH

NIM : 18520048

Telah Disetujui Pada Tanggal 8 September 2022

Dosen Pembimbing,



Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP. 198602282019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Anggaran Brbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo

SKRIPSI

Oleh

SITI KHOIRIYAH

NIM : 18520048

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 11 November 2022

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji Utama

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

NIP : 197411221999031001

2 Ketua Penguji

Meldona, MM

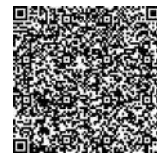
197707022006042001

3 Sekretaris Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A

198602282019032010

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khoiriyah

NIM : 18520048

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Pasuruan, 11 November 2022

Hormat Saya



Siti Khoiriyah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahi hamdan wa syukron lillah, wa shalatu wassalamu ála saidina muhammdin wa ála alihi wa shohbihi ajma“in. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Santoso dan Ibu Mariyamah) yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materi dan juga tidak pernah berhenti melangitkan doa doanya untuk saya, untuk kelancaran, kemudahan dan kesuksesan saya.
2. Kakak pertama saya Muhammad Mariyanto dan kakak kedua saya Khusnul Khotimah beserta keluarga serta ponakan saya yang sangat lucu yang memberikan energy positif dan semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Kekasih saya Mas Haris Febriansyah Rizani, yang sudah mensupport saya baik melalui kata kata semangatnya maupun bantuan yang lainnya.
4. Ibu Fatmawati Zahroh selaku dosen pembimbing. Yang sudah mengarahkan saya akan baik benarnya skripsi saya
4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, semoga bisa saya amalkan di kemudian hari.
5. Pak Camat Gadingrejo beserta seluruh Staffnya.

MOTTO

“Selalu Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dengan harapan dapat menjadi wawasan baru serta bagi para pembaca dan evaluasi bagi Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Skripsi ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk tugas akhir pada program stata satu (S1) jurusan Akuntansi Fakuktas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam dalamnya kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan support, karena tanpa partisipasinya penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud.

Pasuruan, 11 November 2022

Hormat Saya



Siti Khoiriyah

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)..... | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 4 |
| BAB II. LANDASAN TEORI | 6 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 6 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Anggaran..... | 11 |
| 2.2.2 Anggaran Berbasis Kinerja..... | 12 |
| 2.2.3 Akuntabilitas Kinerja | 15 |
| 2.3 Anggaran Perspektif Islam | 19 |
| 2.4 Kerangka Konseptual..... | 20 |
| 2.5 Hipotesis Penelitian | 21 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 26 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 26 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 26 |
| 3.3 Populasi dan Sampel..... | 26 |
| 3.3.1 Metode Pengambilan Sampel..... | 29 |
| 3.4 Data dan Jenis Data..... | 29 |
| 3.4.2 Teknik Pengumpulan Data | 30 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.4.3 Instrumen Penelitian..... | 30 |
| 3.5 Definisi Operasional Variabel..... | 31 |
| 3.6 Analisis Data | 35 |
| 3.6.1 Pengujian Data... .. | 35 |
| 3.6.2 Uji Asumsi Klasik... .. | 36 |
| 3.6.3 Regresi Linear Berganda... .. | 37 |
| 3.6.4 Uji Hipotesis | 38 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 45 |
| 4.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo.. | 45 |
| 4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Gadingrejo..... | 49 |
| 4.1.3 Sasaran dan Tujuan..... | 50 |
| 4.2 Hasil Pengumpulan Data..... | 51 |
| 4.2.1 Deskripsi Data Variabel Anggaran Berbasis Kinerja..... | 53 |
| 4.2.2 Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 58 |
| 4.3 Analisis Data..... | 59 |
| 4.3.1 Uji Data..... | 59 |
| 4.3.2 Uji Asumsi Klasik..... | 63 |
| 4.3.3 Analisis Regresis Linear Berganda..... | 66 |
| 4.3.4 Koefisien Determinasi..... | 68 |
| 4.3.5 Uji Hipotesis..... | 69 |
| 4.4 Pembahasan..... | 72 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 77 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 77 |
| 5.2 Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 6 |
| Tabel 3.1 Jumlah Populasi | 27 |
| Tabel 3.2 Teknik Penskoran | 30 |
| Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel | 30 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gadingrejo..... | 50 |
| Table 4.2 Karakteristik Responden..... | 52 |
| Tabel 4.3 Akumulasi Jawaban Rencana Anggaran (X1)..... | 54 |
| Tabel 4.4 Akumulasi Jawaban Eksekusi Anggaran (X2)..... | 55 |
| Tabel 4.5 Akumulasi Jawaban Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran (X3)..... | 56 |
| Tabel 4.6 Akumulasi Jawaban Penilaian kinerja (X4)..... | 57 |
| Tabel 4.7 Akumulasi Jawaban Akuntabilitas Kinerja (Y) | 58 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Rencana Anggaran (XI) | 59 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Eksekusi Anggaran (X2) | 60 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran (X3)..... | 60 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Penilaian kinerja(X4) | 61 |
| Tabel 4.12 Hasil Validitas Akuntabilitas Kinerja(Y) | 61 |
| Tabel 4.13 Uji Reabilitas Rencana Anggaran (X1) | 62 |
| Tabel 4.14 Uji Reabilitas Eksekusi Anggaran (X2) | 62 |
| Tabel 4.15 Uji Reabilitas Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran (X3).. | 62 |
| Tabel 4.16 Uji Reabilitas Penilaian kinerja (X4)..... | 62 |
| Tabel 4.17 Uji Reabilitas Akuntabilitas Kinerja (Y) | 63 |
| Tabel 4.18 Hasil Uji Normalitas..... | 64 |
| Tabel 4.19 Hasil Uji Heteroskedasitas..... | 65 |
| Tabel 4.20 Hasil Uji Autokorelasi..... | 66 |
| Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Linear Berganda..... | 67 |
| Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... | 69 |
| Tabel 4.23 Hasil Uji T..... | 70 |
| Tabel 4.24 Hasil Uji F..... | 72 |
| Tabel 4.25 Hipotesis..... | 73 |

ABSTRAK

Siti Khoiriyah 2022, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketentuan dalam penganggaran sektor publik telah mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan ini telah banyak merubah konsepsi anggaran publik Indonesia. Perubahan ke penganggaran berbasis kinerja yang meningkatkan sistem penganggaran konvensional. Konsep value for money diterapkan dalam sistem anggaran ini. Kenyataannya, implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara maksimal dan masih banyak hambatan di daerah ini. Membangun akuntabilitas kinerja yang baik memerlukan penerapan empat proses penganggaran berbasis kinerja, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/akuntabilitas, dan evaluasi. Kecamatan Gadingrejo belum melaporkan ke publik seperti yang terlihat dari website dan media massa lainnya.”Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Pada penelitian ini digunakan studi kausalitas dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh empat variabel bebas terhadap variabel terikat. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel 21 orang pengelola anggaran di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Hasil dari penelitian ini ialah Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, dan penilaian kinerja memiliki pengaruh akan akuntabilitas kinerja instansi, namun instansi tidak mempertanggungjawabkannya kepada publik, hanya melalui sistem SIPD. Dalam hal ini dianggap berpengaruh namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

ABSTRACT

Siti Khoiriyah. 2022. *THESIS*. Title : “*The Influence of Performance-Based Budgeting on Performance Accountability of Government Agencies in Gadingrejo District, Pasuruan City*”

Advisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keyword : *Performance-Based Budgeting, Agency Performance Accountability Government*

Public sector budgeting system policies have undergone various developments. This development has brought many changes to the public budgeting system in Indonesia. Changes to the performance-based budget system as a form of improvement from the previous budget system. In this budget system the concept of value for money is applied. In fact, the implementation of the performance-based budgeting system has not been implemented optimally and there are still many obstacles that occur in the field. To create good performance accountability, four performance-based budgeting processes must be implemented including planning, implementation, reporting/accountability, and evaluation. Gadingrejo District still has not reported to the public above when viewed from the website pages and other mass media. The purpose of this study itself is to find out how the influence of performance-based budgeting on performance accountability, from this background this research is entitled "The Effect of Performance-Based Budgeting on Accountability Performance of Government Agencies in Gadingrejo District, Pasuruan City.

This study uses a causal research with a quantitative approach to determine the relationship of 4 independent variables to the dependent variable. Data were obtained from distributing questionnaires to 21 samples who were budget managers in the Gadingrejo sub-district, Pasuruan City. From the results of the research conducted, budget planning, budget execution, budget reporting/accountability, and performance evaluation have an effect on the performance accountability of government agencies, although they are not accountable to the public, Gadingrejo sub-district has reported to the government above it, namely through the SIPD system.

المستخلص

سبتي خيرياه. 2022 . تأثير الميزنة المستندة إلى الأداء على المساءلة عن أداء الوكالات الحكومية في منطقة جادينجرجو باسوروان
المشرف: فاتماواتي زاهر
الكلمة الرئيسية: الميزانية على أساس الأداء ، المساءلة أداء الوكالة

شهدت سياسات نظام موازنة القطاع العام تطورات مختلفة. أحدث هذا التطور العديد من التغييرات في نظام الموازنة العامة في إندونيسيا. التغييرات في نظام الموازنة على أساس الأداء كشكل من أشكال التحسين من نظام الموازنة السابق. في نظام الميزانية هذا ، يتم تطبيق مفهوم القيمة مقابل المال. في الواقع ، لم يتم تنفيذ نظام الميزنة على أساس الأداء على النحو الأمثل ولا تزال هناك العديد من العقبات التي تحدث في الميدان. ولإنشاء مساءلة جيدة عن الأداء ، يجب تنفيذ أربع عمليات للميزنة على أساس الأداء بما في ذلك التخطيط والتنفيذ والإبلاغ / المساءلة والتقييم. لم تبلغ منطقة غادنغرجو الجمهور أعلاه حتى الآن عند عرضها من صفحات مواقع الويب ووسائل الإعلام الأخرى. والغرض من هذه الدراسة نفسها هو معرفة كيفية تأثير الميزنة القائمة على الأداء على المساءلة في الأداء ، ومن هذه الخلفية يُسمى هذا البحث "تأثير الميزنة المستندة إلى الأداء على أداء المساءلة للوكالات الحكومية في منطقة جادينجرجو ، مدينة باسوروان

تستخدم هذه الدراسة بحثاً سببياً مع نهج كمي لتحديد علاقة أربعة متغيرات مستقلة بالمتغير التابع. تم الحصول على البيانات من توزيع الاستبيانات على ٢١ عينة من مديري الميزانية في منطقة جادينجرجو ، مدينة باسوروان

من نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، فإن تخطيط الموازنة ، وتنفيذ الموازنة ، وتقارير / مساءلة الموازنة ، وتقييم الأداء لها تأثير على مساءلة أداء الوكالات الحكومية ، على الرغم من أنها لا تنفذ المساءلة أمام الجمهور ، فإن منطقة غادنغرجو الفرعية لديها المبلغ عنها للحكومة أعلاه ، أي من خلال نظام معلومات الجهاز المحلي

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan sistem penganggaran lingkup publik telah mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan ini telah membawa banyak perubahan pada sistem penganggaran publik di Indonesia. Perubahan ini dikarenakan banyaknya anggaran yang tidak terserap dengan baik sehingga tidak bersifat ekonomis dan efisien dalam pelaksanaannya.

Karena kurangnya informasi yang memadai bagi pengambil keputusan, didasarkan pada manajemen dan kurang diperhatikanya pada proses perencanaan dan evaluasi. Perubahan anggaran ke berbasis kinerja ini meningkatkan sistem penganggaran konvensional. Dalam penganggaran ini diterapkan konsepsi *value for money*, seperti ekonomi, efisiensi dan efektivitas, yang tidak melekat pada sistem anggaran lama. Kenyataannya, sistem penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara optimal dan masih banyak hambatan di daerah ini.. Suryanto dan Poni (2019)

Penganggaran berbasis kinerja membutuhkan output yang optimal atau setiap biaya dialokasikan dan berdasarkan rasio kinerja harga (*value for money*)

Berdasarkan Perpres No. 29 (2014), akuntabilitas kinerja ialah bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam melaporkan hasil atas pelaksanaan

program dan kegiatannya dilakukan untuk memenuhi misi organisasi yang terukur dari sasaran/sasaran kinerja. Dibentuk berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan secara sistematis.

Agar pertanggungjawaban atau Akuntabilitas Kecamatan Gadingrejo tercapai dengan baik maka kecamatan gadingrejo dituntut agar senantiasa dilakukan perbaikan atas kinerjanya. Dalam merencanakan pembangunan daerah di daerah, Gadingrejo tentu saja mentaati arah dan target pembangunan daerah, melalui diiperhatikanya visi, misi serta arah daerah yang harus dicapai dalam lingkup Kecamatan Gadingrejo. Agar dapat dipertanggungjawabkan, ada empat tahap penerapan penganggaran berbasis kinerja diantaranya :

1. Rencana anggaran
2. Eksekusi anggaran
3. Pelaporan atau akuntabilitas anggaran
4. Penilaian kinerja

Mengenai keempat proses di atas, salah satunya adalah pelaporan atau pertanggungjawaban. Dalam hal ini, instansi pemerintah baik itu sektor kecamatan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD, menerbitkan laporan keuangan untuk pemeriksaan, dan memiliki akuntabilitas kepada publik.

Pada penerapan dilapangan belum seperti yang diharapkan. Kecamatan Gadingrejo belum melaksanakan Pertanggungjawaban apapun kepada public baik melalui media online maupun baliho dll. Artinya, di indikasi bahwa pemahaman para pegawai Kecamatan Gadingrejo akan Anggaran Berbasis Kinerja masih kurang, sehingga tingkat akuntabilitas kinerjanya pun masih

belum bisa dikatakan baik. Artinya, di indikasi bahwa pemahaman para pegawai Kecamatan Gadingrejo akan Anggaran Berbasis Kinerja masih kurang, sehingga tingkat akuntabilitas kerjanya pun masih belum bisa dikatakan baik.

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penerapan anggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, eksekusi anggaran, pelaporan /pertanggungjawaban anggaran, serta penilaian kinerja harus dengan sebenarnya bias dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh Anggaran berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Aprila dan Melfariza (2014) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bengkulu. Raissa Aidintya Sembiring dan Heni Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magelang. Hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Rezky Septian (2021) menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Bogor, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran dan Penilaian Kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Bogor. Sebuah pemerintahan daerah akan

menunjukkan kinerja yang baik dimuali dari pembenahan otonomi daerahnya hingga yang terkecil seperti Kecamatan.

Melihat berbagai permasalahan dan *urgensifitas* yang diuraikan di atas menunjukkan ketidak konsistenan system anggaran berbasis kinerja yang diterapkan di daerah tertentu. Sehingga peneliti teraik untuk melakukan penelitian yang dilakukan dengan judul Pengaruh Anggaran Berbasis kInerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instanasi Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perencanaan anggaran bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?
2. Apakah Eksekusi Anggaran bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?
3. Apakah pelaporan/akuntabilitas anggaran bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?
4. Apakah penilaian kinerja bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?
5. Apakah Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, pelaporan/akuntabilitas dan penilaian kinerja bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.
2. Untuk mengetahui pengaruh Eksekusi Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.
4. Untuk mengetahui pengaruh Penilaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.
5. Untuk mengetahui pengaruh Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan/ pertanggungjawaban dan Penilaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, berikut adalah manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Penulis

Penulis dapat mengerti dan memahami seperti apa pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

1.4.2 Bagi Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Memberikan masukan serta informasi kepada para stakeholder yang

terlibat dalam proses penganggaran (KPA, PA, Bendahara, dll) pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sebagai bentuk pertimbangan Kecamatan Gadingrejo.

1.4.3 Bagi Kampus

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di penelitian sebelumnya menunjukkan persamaan ataupun perbedaan dengan peneliti lain. Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan referensi atau acuan untuk penyusunan penelitian ini. Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang meneliti dampak *Performance based budgeting* akan akuntabilitas kinerja instansi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti | Judul | Metode/Analisis Data | Hasil Penelitian |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Komang Sri Endrayani (2014) | Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja) | Kuantitatif | Ada pengaruh positif antara praktik anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah |

| No | Nama Peneliti | Judul | Metode/ Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Ana Muchlisa R. (2017) | Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada BPBD Provinsi Sumatera Selatan) | Kuantitatif | Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diartikan bahwa apabila pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan baik maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi. |
| 3. | Anggi Pratama Nst, S.E, M.Si dan Bagus Handoko, S.E, M.Si (2018) | Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan kecamatan Datuk Bandar | Kuantitatif | Hasil penelitian ini menyebutkan seluruh aktivitas anggaran berbasis kinerja sebagai peningkatan kinerja di seluruh instansi yang ada kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai telah sesuai atau berjalan dengan baik |
| 4. | Resky Septiyan (2021) | Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada SKPD Kabupaten Bogor) | Kuantitatif | Rencana Anggaran dan Eksekusi Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran Dan Penilaian kinerja berpengaruh terhadap |

Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Metode/ Analisis Data | Hasil Penelitian |
|----|---------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan / Pertanggungjawaban Anggaran, Penilaian kinerja berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

Pertama, penelitian yang dilakukan Komang Sri Endrayani, dkk (2014) dengan judul penelitian “Dampak penerapan performance-based budgeting terhadap akuntabilitas kinerja instansi (studi kasus di Dinas Kehutanan UPT KPH Kota Bali Tenga Singaraja) menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara implementasi performance-based budgeting terhadap akuntabilitas instansi. Persamaannya terletak pada variabel dependennya yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaannya terletak pada metode analisis data yang dilakukan, penelitian yang dilakukan Komang, dkk menggunakan analisis regresi sederhana, jika penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan analisis regresi berganda.

Kedua, penelitian yang dilakukan Ana Muchlisa R. (2017) yang berjudul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian yang dilakukan Ana Muchlisa R. ada pengaruh antara anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini diartikan jika penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan semakin baik maka semakin baik pula akuntabilitas kinerja lembaga itu. Persamaan dengan penelitian ini ialah penggunaan variabel dependennya yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan, penelitian Ana Muchlisa hanya digunakan 1 variabel bebas yaitu pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja. Pada penelitian yang akan dilakukan digunakan 4 variabel bebas, Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan atau pertanggungjawaban (X3), penilaian kinerja (X4).

Ketiga, Anggi Pratama Nst, S.E, M.Si dan Bagus Handoko, S.E, MSi (2018) melakukan penelitian dengan judul “ “Implementing Performance-Based Budgeting dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai” persamaan yang ada pada penelitian ini adalah penggunaan indeks nya yaitu Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, dan penilaian kinerja, Perbedaannya terletak pada teknik penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Anggi Pratama dan Bagus Handoko, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. .

Keempat, Resky Septiyan (2021) melakukan penelitian berjudul

'Dampak Praktik Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bogor)'. Temuannya meliputi: Rencana Anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi; Eksekusi Anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi; pelaporan/akuntabilitas anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi; Penilaian kinerja. persamaan dengan penelitian ini adalah teknik analisa data yang digunakan yaitu digunakan teknik analisis regresi berganda dikarenakan menggunakan lebih dari 1 variabel independent yaitu, Perbedaanya terletak pada objek penelitian yang dilakukan, jika penelitian yang akan dilakukan ini pada kecamatan gadingrejo, bisa dikatakan dalam objek penelitian dengan skala kecil dengan melihat urgensifitas yang ada.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran pada dasarnya adalah rencana keuangan. Anggaran merupakan alat kontrol yang penting karena merupakan bagian dari perencanaan yang terintegrasi ke dalam fungsi kontrol. Anggaran juga merupakan bagian penting dari kegiatan yang dilakukan. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang dapat dibiayai dari dana negara atau daerah. Anggaran bukanlah proses akuntansi karena merupakan rencana keuangan, bukan catatan transaksi. Fungsi anggaran adalah alat perencanaan guna tercapainya tujuan suatu lembaga. Dari berbagai pengertian yang tertera diatas, maka pengertian anggaran disimpulkan sebagai berikut.

1. Rencana keuangan masa depan, termasuk pendapatan dan pengeluaran.

2. Garis besar strategi alokasi sumber daya pembangunan pemerintah.
3. alat kontrol.
4. Instrumen Politik.
5. Di buat dalam periode tertentu

Di Indonesia, anggaran diatur oleh Pasal 23A UUD 1945 dan UU Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya dilaksanakan setiap tahun di bawah UU APBD atau Perda tentang APBD.. Arif, dkk (2009:125)

2.2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.2.2.1 Pengertian anggaran berbasis kinerja

Menurut Utomo (2005:10) Penganggaran berbasis kinerja melengkapi anggaran sebelumnya, dan penganggaran berbasis kinerja berpatokan pada output atau hasil organisasi yang terkait visi, misi, dan perencanaan strategis organisasi. Fokus utama anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai serta alokasi dana secara lebih efektif dan efisien. Menurut Soderi selaku Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada laman Youtube BPPK Kemenkeu RI mengungkapkan bahwa Anggaran berbasis kinerja itu adalah suatu penyusunan rencana keuangan dengan mengkaitkan antara dana dan kinerja yang akan dicapai selanjutnya.

Soderi juga menjelaskan, dalam penjelasan undang-undang 17 tahun 2003, Penganggaran berbasis kinerja menaruh citra yang objektif dan adil tentang aktivitas pemerintah dengan membuat statistik keuangan pemerintah

lebih mudah disajikan dan lebih dapat diandalkan.

Pada dasarnya, membuat anggaran berbasis kinerja menarik perhatian pada apa yang ingin Anda capai. Kunci dari metode ini adalah efisiensi dari berbagai aktivitas melalui penerapan biaya standar (cost basis). Dengan menggunakan spesifikasi biaya ini, anggaran tahun depan dibuat dan dapat disesuaikan dengan pertimbangan logis. Arif, Muchlis, Iskandar (2009:

131)

2.2.2.2 Manfaat anggaran berbasis kinerja

Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pelatihan dan Keuangan (2008) berikut adalah Manfaat anggaran Berbasis Kinerja untuk pengelolaan keuangan daerah :

1. Mengalokasikan sumber daya yang langka (terbatas) untuk kegiatan pemerintah berprioritas tinggi dengan penganggaran berbasis kinerja sehingga diharapkan tercapainya tujuan pemerintah secara efektif dan tepat guna .Penetapan anggaran berbasis kinerja sebagai system penganggaran sector public adalah hal yang utama karena dapat melaksanakan kegiatan dengan transparan, anggaranya jelas outpunya pun juga jelas.
2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja mengalihkan inti pokok pembiayaan pemerintah dari sistem item ke pendanaan program pemerintah dengan tujuan eksklusif yang terkait dengan kebijakan utama pemerintah.
3. Badan politik (kabinet dan parlemen) dapat memprioritaskan kegiatan pemerintah.

4. Dalam jangka menengah, perubahan kebijakan akan dibatasi, tetapi kementerian akan memastikan bahwa target yang dipimpin sektor tidak terganggu oleh sumber daya yang tidak cukup banyak dengan menetapkan prioritas kerja yang telah ditetapkan, kita dapat lebih fokus pada prioritas yang ingin dicapai.
6. Jika anggaran difokuskan pada keluaran dan hasil, diharapkan akan terwujud efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional.

2.2.2.3 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Secara singkat ada 4 tahap siklus anggaran yaitu :

1. Tahap Persiapan

Proses ini memperkirakan tingkat pengeluaran berdasarkan perkiraan perolehan yang tersedia didasarkan atas visi, misi, dan tujuan tahunan organisasi untuk periode pemerintahan mendatang..

2. Tahap Ratifikasi

Pada tahap ini, para pemimpin harus mampu menjawab segala macam pertanyaan dan keberatan dari Kongres dan memberikan tanggapan yang wajar (kemampuan politik, keahlian menjual, membangun koalisi).

3. Tahap Implementasi

tahap implementasi adalah yang penting dan diperhatikan oleh para pengelola keuangan publik ialah memiliki sebuah (SIA) sistem informasi akuntansi serta sistem pengendalian manajemen. Agar terciptanya sistem informasi akuntansi yang memadai serta bijak dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran yang sudah disepakati harus diimbangi dengan diadopsikan pada

tahap penyusunan anggaran periode selanjutnya para pengelola keuangan bertanggungjawabn dalam hal ini.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Pada prose ini erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas. Apabila fase penerapan didukung oleh sistem akuntansi dan pengendalian bisnis yang baik, diharapkan tidak banyak masalah yang muncul selama fase pelaporan dan evaluasi ini.. (Mardiasmo, 2009 *dalam* Amanda, 2017)

2.2.2.4 Kelebihan anggaran berbasis kinerja

Keunggulan penerapan anggaran berbasis kinerja (Nordiawan, 2009:27 Nurhikmah, 2014) adalah:

1. Anggaran dibuat didasarkan pada kegiatan yang didukung oleh proyeksi biaya dan kinerja terukur secara angka.
2. Tekankan perlunya mengukur output dan input serta aspek usability.
3. Penganggaran berbasis kinerja mengharuskan adanya data kinerja yang akan membuat pembuat undang-undang melakukan penambahan bahkan pengurangan atas jumlah yang dibutuhkan untuk kegiatan yang ditentukan.
4. Penganggaran berbasis kinerja berfokus pada aktivitas yang menggunakan anggaran daripada seberapa banyak anggaran yang dipergunakan.

2.2.2.5 Prinsip anggaran berbasis kinerja

Menurut Utomo (2005:16) ada 3 Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja yang mendasar untuk penyusunan anggaran, diantaranya :

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan proses perencanaan, kesiapan

pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi anggaran. Semua masyarakat berhak mengetahui proses penganggaran, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat..

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dasar untuk mempertanggungjawabkan kepada publik. Dengan kata lain, proses penganggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga perwakilannya. Akuntabilitas di sini didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ketepatan waktu dan akuntabilitas.

3. *Value For Money*

Adapun penerapan prinsip *value for money* memberikan manfaat diantaranya :

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat sasaran).
- b. Meningkatkan taraf pelayanan publik dan menurunkan biaya pelayanan melalui penghematan dan pengurangan efisiensi.
- c. Distribusi pengeluaran lebih diarahkan pada kepentingan bersama.
- d. Meningkatkan kesadaran dana masyarakat (*awareness of public cost*).

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja

2.2.3.1 Pengertian akuntabilitas

Arti kata akuntabilitas sendiri dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip akuntabilitas publik. Dengan kata lain, dalam penganggaran harus dimulai dengan merencanakan, menyusun dan melaksanakan, serta melaporkan dan

mempertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas adalah konsep menyeluruh bagi pemerintah untuk memberikan pelaporan tentang dana publik dan untuk apa dana tersebut digunakan.. Utomo (2005:109)

Berikut 7 indeks akuntabilitas Menurut Krisna (2003), yaitu:

1. Proses pengambilan keputusan tertulis harus tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan, dan kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan standar dan kode etik program. Kami bertindak sesuai dengan prinsip operasi yang sehat.
2. Ketepatan dan Kecukupan Informasi Mengenai Pencapaian Tujuan
3. Kejelasan tujuan politik yang ditentukan dan dibahas.
4. Kelayakan dan Konsistensi Tujuan dan Prioritas Operasional.
5. Penyebaran informasi tentang suatu kebijakan menggunakan media online atau massa
6. Akses keterbukaan public atau masyarakat terhadap informasi tentang keputusan setelah keputusan dibuat, dan mekanisme klaim publik.
7. Sistem informasi manajemen dan pemantauan *output*

Alat ukur untuk indeksnya adalah :

1. Visi dan Misi
2. Deskripsi atau referensi kerja di bidang-bidang berikut:
 - a. Pilihan penggunaan metode pelayanan
 - b. Informasi tingkat layanan

- c. prosedur atau barometer layanan
- d. kriteria efisiensi
- e. Kapasitas yang cukup
- f. kualitas yang wajar
- 3. Hasil kebijakan daerah (proses pengambilan keputusan):
 - a. sebuah. perilaku dasar (pola dasar)
 - b. Propeda
 - c. Rencana strategis
 - d. Rapetada
 - e. APBD
 - f. Perencanaan sistem dan prosedur
- G. Manajemen pembangunan daerah
- H. Anggaran tahunan
 - i. Peraturan daerah
- 4. Laporan Tahunan (Laporan Tanggung Jawab)
- 5. Laporan keu. tahunan
- 6. Ketentuan daerah
 - a. Penyediaan barang dan jasa
 - b. Tax dan Cost (retribusi)
 - c. Pendemokrasian
 - d. keuangan daerah
- 7. Menentukan kriteria untuk mengukur kinerja perangkat

2.2.3.2 Jenis-jenis akuntabilitas

Mahmudi (2013) menyebutkan ada 2 jenis akuntabilitas, diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban ditujukan untuk pimpinan yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban kepala lembaga terhadap kepala daerah, pertanggungjawaban menteri kepada presiden, dan

sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal ialah Pertanggungjawaban yang dilakukan kepada publik dan lembaga lain tanpa memiliki hubungan yang menyeluruh dengan bawahan.

2.2.3.3 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Menurut Utomo (2005:197) Akuntabilitas kinerja merupakan tanggung jawab penyelenggara atas berhasil tidaknya misi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, dilakukan secara berkala dan diukur terhadap indikator kinerja.

2.2.3.4 Prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Dasar untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di sebutkan ada 6 prinsip pelaksanaan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah diantaranya adalah :

1. Pengurus dan seluruh pegawai instansi terkait harus berkomitmen.
2. Harus sesuai dengan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya sesuai dengan undang undang.
3. Menggambarkan suatu capaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Mengarah kepada terwujudnya visi ,misi, serta output & manfaat yg dicapai
5. andal, faktual, keterbukaan dan kebenaran.
6. Menjelaskan berhasil tidaknya tujuan yang dicapai.
7. 2.2.3.5 Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pada Inpres No. 29 (2009) pasal 5 bagian kesatu disebutkan penyelenggaraan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah inskripsi perencanaan dalam kurun waktu 1 masa yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Output dari fase ini adalah pengembangan rencana strategis lembaga, termasuk visi, misi, arah, target, kebijakan, dan program.

2. Perjanjian kinerja

Perjanjian kerja atau yang disebut dengan kontrak kerja ialah seperangkat dokumen penugasan yang diserahkan oleh manajer institusi senior untuk manajer yang dibawahnya dalam melaksanakan suatu program dengan indeks kerjanya.

3. Pengukuran kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. Perbandingan antara capaian output dengan target output yang telah ditetapkan di kontrak kinerja dalam kurun waktu tahun berjalan.
- b. Perbandingan capaian output di tahun itu terhadap target output lima tahun yang telah di susun dalam Renstra

4. Manajemen data kinerja

Manajemen Data Kinerja meliputi, pencatatan, pengolahan serta pelaporan data kinerja. Adapun Manajemen data kinerja yang dimaksud adalah:

- a. Penentuan data dasar (basic data)

- b. Menyediakan alat pendataan untuk pencatatan dan registrasi
- c. Manajemen dan menyimpan data
- d. koleksi serta ringkasan

5. Pelaporan kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan jugamempresentasikan Laporan kinerja atas pekerjaan yang dilakukan berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja internal (laporan triwulan) dan laporan kerja.

6. Reviu (Validasi) dan penilaian kinerja

Validasi adalah langkah untuk memastikan keamanan informasi yang disediakan sebelum diserahkan kepada pimpinan. Penilaian kinerja ialah bentuk penilaian sebagai bagian dari pelaksanaan SAKIP suatu instansi.

2.3 Anggaran dalam Perspektif Islam

Islam disebut agama yang kompleks, islam mampu mengatur apapun tnetang kehidupan makhluk. begitu pula masalah perencanaan keuangan atau anggaran, islam mengataurnya di dalam Alquran dan hadits. Dalam Alquran, anggaran dijelaskan pada surat Al-Furqan ayat 67 yaitu :

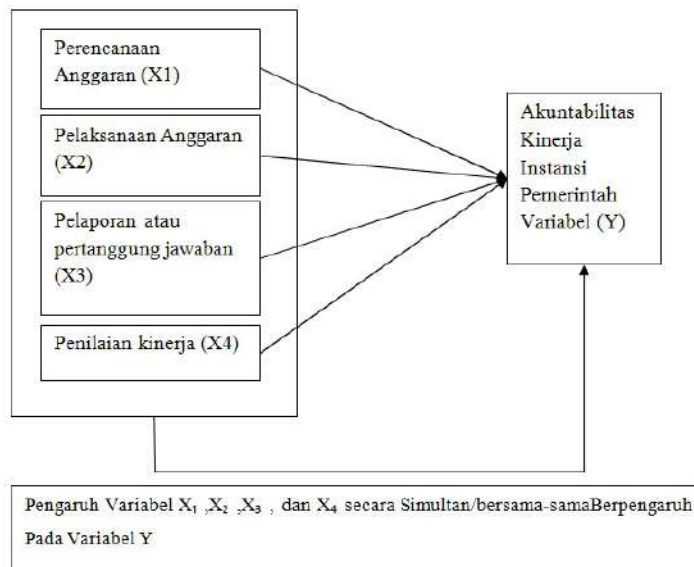
قَوَامًا ذَلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَقْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

Artinya : “ Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang- orang yang apabila menginfakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,”

Maksudnya adalah, mengeluarkan harta secara wajar, tidak kikir maupun berlebihan. Islam agama adalah agama yang moderat serta

menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat. Anggaran disusun untuk rencana kegiatan yang mencerminkan masyarakat.

2.4 Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

Kebijakan penganggaran berbasis kinerja Deputy IV BPKP mewajibkan pengelola keuangan untuk menyusun laporan kinerja pada akhir periode setelah selesai dilaksanakannya program dan kegiatan. laporan keuangan dan Laporan kinerja non-keuangan digunakan untuk pertimbangan atas revisi tahun selanjutnya dan memberikan pertanggungjawaban rakyat atas dana yang telah digunakan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Pengaruh Rencana Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

Rencana Anggaran melibatkan pembuatan dan penggunaan pilihan, menghubungkan kenyataan, dan membuat dugaan akan masa selanjutnya, untuk menggambarkan dan menyusun kegiatan yang perlu untuk disarankan untuk capaian output yang di rencanakan (Winardi, 2007). Atas usulan-usulan tersebut, sebelum lembaga melaksanakan pekerjaan atau kegiatannya, kepala bagian masing-masing harus mengidentifikasi aktivitas apakah yang akan dilakukan di masa depan, apa hasil yang didapat atas kegiatan tersebut, dan apa yang perlu dilakukan. Disimpulkan bahwa perlu dirumuskan ada tidaknya Rencana ini memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan benar. Di sektor publik, proses anggaran berkaitan erat dengan penentuan jumlah dana, dalam satuan mata uang, yang dialokasikan pada tiap-tiap program dan kegiatan. Penganggaran harus tepat dan berhasil. Jika tidak pada tempatnya, akan berpengaruh pada gagalnya rencana yang sebelumnya sudah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Kajian Hapiarti (2012) berjudul 'Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi di Pemerintah Kota Parepare', mengemukakan ada pengaruh antara Rencana Anggaran dan akuntabilitas kinerja lembaga. Pemerintah pada Pemerintahan Parepare.

dari penjelasan diatas ditentukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Rencana Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo

2. Pengaruh Eksekusi Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah

Untuk mencapai anggaran, melaksanakan kegiatan pemerintah dengan tetap perpedoman akan anggaran yang telah ditetapkan juga berarti mencapai tujuan pemerintah. Oleh karena itu, anggaran harus berkualitas baik dan *practical*, Meningkatkan akuntabilitas publik melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan eksekusi anggaran yang lebih baik. Hasil penelitian Hapiarti (2012) Dampak Implementasi *performance based budgeting* terhadap Akuntabilitas Instansi di Pemerintah Kota Pare-Pare menunjukkan bahwa implementasi anggaran berdampak pada akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Pare-Pare.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat membuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Eksekusi Anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaporan meliputi jumlah distribusi anggaran yang digunakan oleh entitas, jumlah anggaran yang dialokasikan, dan pencapaian kinerja program yang dilakukan, disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang semua aktivitas belanja yang dilakukan oleh PEMDA dalam kurun waktu satu tahun. Laporan keuangan daerah memberikan keterangan yang membantu pengguna laporan guna menilai akuntabilitas keputusan ekonomi, sosial dan politik dan kegunaan keputusan. penelitian yang dilakukan Resky Septian (2021) menunjukkan hasil jika pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran

berpengaruh akan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bogor.

Berikut hipotesis yang di tentukan atas uraian di atas:

H3: Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo.

4. Pengaruh penilaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Winardi (2007) menyatakan bahwa tujuan diadakannya penilaian kinerja adalah untuk mengetahui perolehan, kemajuan, hambatan yang dihadapi atau alasan tidak tercapainya kinerja suatu organisasi dalam mencapai misi yang direncanakan sedemikian rupa. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik seharusnya dapat menaikkan tingkat akuntabilitas kinerja institusi. karena diharapkan instansi itu dapat menaikkan tingkat kinerjanya di masa mendatang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Resky Septian (2021) menunjukkan hasil jika Penilaian kinerja memiliki pengaruh akan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kotabogor.

Atas dasar penjelasan diatas ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Penilaian kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo

5. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Gadingrejo

Agar dapat dipertanggungjawabkannya Eksekusi Anggaran berbasis kinerja, 4 proses ini perlu dilalui agar dapat mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja yang tepat. Itu adalah

a. Perencanaan/perancangan anggaran

b. Eksekusi Anggaran

c. Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran

4. penilaian kinerja

Menurut Komang (2014), penganggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan dengan baik meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Juga menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara dampak penerapan anggaran. Dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis :

H5 : Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan/ Pertanggung jawaban Anggaran, dan Evaluasi Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Gadingrejo

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian kausal pendekatan kuantitatif. dimana Sugishirono (2016) menjelaskan bahwa, penelitian kausalitas ialah penelitian digunakan untuk memahami dan mengetahui apakah terdapat hubungan antara 2 variabel atau lebih.

Digunakanya jenis penelitian ini, peneliti menemukan Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, pelaporan atau akuntabilitas anggaran, dan penilaian kinerja sebagai variabel bebas mempengaruhi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo sebagai variabel terikat.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta, Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67112.

3.3 Populasi dan Sampel

Sinambela (2014:94) Populasi ialah objek atau subjek dengan total dan spesifikasi tertentu untuk menarik sebuah kesimpulan lebih lanjut yang ditentukan oleh peneliti. Populasi penelitian ini terdiri dari Kuasa pengguna anggaran (KPA), pengguna anggaran (PA), Bendahara Pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dan PPK di Kecamatan Gadingrejo, dengan komposisi berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Populasi

| No. | Jabatan | Jumlah |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Kecamatan | | |
| 1 | Camat | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kecamatan | 2 |
| 3 | PPK SKPD | 1 |
| 4 | PPBJ | 1 |
| 1. Kelurahan Bukir | | |
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |
| 2. Kelurahan Sebani | | |
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |
| 1. Kelurahan Krapyakrejo | | |
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |

| 1. Kelurahan Gentong | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |

| 2. Kelurahan Gadingrejo | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----|
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |
| 3. Kelurahan Petahunan | | |
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |
| 4. Kelurahan Randusari | | |
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |
| 5. Kelurahan Karang Ketug | | |
| 1 | Lurah | 1 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Kelurahan | 1 |
| TOTAL | | 21 |

3.3.1 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan subset item atas populasi yang ditentukan guna partisipasinya dalam penelitian (Malhotra, 2010; Sinambela, 2014: 95) teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penentuan sample jenuh yang menggunakan metode penentuan sampel karena keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel. Ini terjadi ketika populasi relatif kecil. sampel penelitian ini adalah 21 orang dari populasi yaitu seluruh pengguna

anggaran listrik di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan uraian pada Tabel 3.1.

3.4 Data dan Jenis Data

Data Primer digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penyebaran kuesioner untuk diisi oleh responden atau sample penelitian.

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terkait indeks yang digunakan di unit kerja terkait.

3.4.2 Instrumen atau alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa kuisioner atau angket. Suharsimi Arikunto mengungkapkan jika instrumen penelitian adalah alat yang dipilih peneliti untuk dipergunakan ketika melakukan kegiatan pengumpulan data untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sistematis. dan terfasilitasi.dengan begitu Merupakan alat instrumen penelitian untuk mengumpulkan data untuk diolah.

Skala Likert digunakan sebagai instrument penelitian ini dimana menurut Sinambella (2014:144) Skala Likert yang digunakan dalam studi sosial tujuanya untuk mengukur sebuah persepsi individu atau kelompok atas sebuah fenomena sosial yang terjadi. Survei menggunakan kuesioner atau alat survei untuk menetapkan skor berikut:

Tabel 3.2
Teknik Penskoran Kuesioer

| Keterangan | (STS) | (TS) | (N) | (S) | (SS) |
|------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|
| | Sangat Tidak Setuju | Tidak Setuju | Netral | Setuju | Sangat Setuju |
| Skor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Hatch dan Farhadi, “Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut orang atau benda, yang dapat bervariasi dari orang ke orang atau dari objek ke objek. Variabel survei terdiri dari variabel terikat dan variabel bebasnya. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, pelaporan dan akuntabilitas, serta penilaian kinerja, dan variabel dependennya adalah akuntabilitas kinerja instansi.

Tabel 3.3
Operasionalisasi Variabel “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)”

| Variabel | Definisi Variabel | Dimensi | Indikator |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perencanaan Anggaran (X1) | Tahap Rencana Anggaran dilakukan dengan mengukur pengeluaran berdasarkan perkiraan pendapatan yang dapat dibelanjakan berdasarkan: visi, misi serta tujuan organisasi untuk satu tahun periode ke depan | • Penentuan Program yang terukur | 1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang ingin dicapai. |
| | | • Dokumen kebijakan umum anggaran berdasar pada RKPD | 2. RKPD Memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaanya. 3. Dokumen KUA berdasarkan RKPS Periode sebelumnya |

| Variabel | Definisi Variabel | Dimensi | Indikator |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan | <p>4. SKPD dalam perencanaan anggaran mengikuti PPAS dalam menyusun RKA-SKPD.</p> <p>5. Penyusunan RKA-SKPD berdasar pada pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Program dan kegiatan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. | <p>6. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Isi atas RKA-SKPD memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas | <p>6. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.</p> <p>7. .Dalam penyusunan RKA-SKP, Memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran untuk mencapai prestasi kerja.</p> |

| Variabel | Definisi Fariabel | Dimensi | Indikator |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ kepala daerah menyusun rencana kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD | 8. .Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang disepakati antara pemerintah, DPRD dan SKPD itu sendiri. |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD. | 9. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama sebelum diajukan untuk proses evaluasi. |
| 2. Pelaksanan Anggaran (X2) | Pada tahap pelaksanaan, pimpinan lembaga bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan akuntansi, memantau, mencatat penggunaan anggaran dan hasil dalam sistem akuntansi keuangan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam pelaksanaannya SKPD mengarah pada dokumen Eksekusi Anggaran tetap dan rencana anggaran kas. | 1. Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu pada DPA dan rencana anggaran kas yang ditetapkan. |

| Variabel | Definisi Variabel | Dimensi | Indikator |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKPD mengetahui prosedur dalam melaksanakan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah jumlah yang tertera. | <p>2. Dokumen anggaran kas dan DPA digunakan PPTK sebagai pedoman untuk penyediaan dana bagi setiap SKPD.</p> <p>3. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan anggaran kas.</p> |
| 3. Pelaporan /Pertanggungjawaban Anggaran (X3) | Pelaporan/pertanggungjawaban terkait aspek akuntabilitas, yakni mencakup besarnya pendistribusian unit kerja, besarnya anggaran yang dikeluarkan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaporan output atau program kegiatan yang terlaksana | <p>1 .Seitap SKPD membuat laporan mengenai pengeluaran kas yang terjadi.</p> <p>2. Laporan Keuangan dibuat dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatn atas laporan Keuangan.</p> <p>3.Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD sesuai</p> |

| Variabel | Definisi Variabel | Dimensi | Indikator |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | dengan prosedur yang ditetapkan dengan menerbitkan laporan untuk diperiksa & sebagai pertanggungjawaban public. |
| 4. Penilaian Kinerja (X4) | Penilaian kinerja berdasarkan pada laporan kinerja dievaluasi oleh pimpinan sehingga mereka mengetahui dan mengevaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan anggaran. | ▪ evaluasi hasil kerja | 1. Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan 2. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan segi ekonomi, efisiensi, efektivitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. |
| 5. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) | Kewajiban suatu instansi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melakukan misi organisasi dan mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. | ▪ Penetapan Perencanaan | 1. Adanya keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan 2. Kejelasan sasaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat 3. Visi dan misi perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi |

| Variabel | Definisi Variabel | Dimensi | Indikator |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ekonomis dan Efisiensi | <p>4. indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program</p> <p>5. melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan | <p>Membuat laporan kendala kepada atasan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan melakukan pengecekan terhadap jalanya program. pelaksanaan kegiatan telah di control dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Output/outcome | <p>9. Kegiatan/program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada pada masyarakat.</p> |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan informasi kinerja | <p>10. LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan program selanjutnya, diterbitkan di waktu yg ditentukan.</p> |

3.6 Analisis Data

3.6.1 Pengujian Data

3.6.1.1 Uji validitas

Validitas ialah untuk mengetahui apakah suatu alat ukur akurat dan benar ketika menjalankan fungsinya.. Sehingga pengujian validitas mengacu kepada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. kuesioner dianggap benar apabila pertanyaan pada kuesioner itu dapat mengatakan sesuatu yang diukur oleh survei tersebut. Uji validitas dilakukan pada alat program statistik sesuai dengan kriteria berikut:

$r_{Hitung} \geq r_{Tabel}$ dengan nilai sig. 0,05 maka dinyatakan valid

3.6.1.2 Uji Reabilitas

Reabilitas atau yang disebut juga dengan keandalan ialah cara untuk mendapatkan informasi untuk pengumpulan data yang mengungkapkan kebenaran yang ada di lapangan.

Pada penelitian ini Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden dari mahasiswa jurusan akuntansi UIN Malang, dengan menggunakan pertanyaan uji plausibility untuk mengetahui reliabilitas. Menggunakan SPSS 26, variabel dinyatakan otoritatif menurut kriteria berikut:

1. Jika $r\text{-Alpha}$ positif $>$ dari $r\text{-tabel}$ maka dinyatakan reliabel.
2. Jika $r\text{-alpha}$ negatif $<$ lebih kecil dari $r\text{-tabel}$ dinyatakan tidak reliabel.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Cronbach's Alpha $>$ 0,6 | Reliabel |
| Cronbach's Alpha $<$ 0,6 | Tidak Reliabe |

3.6.1.3 Uji asumsi klasik

1. Uji normalitas

Tujuan dilakukanya uji normalitas ialah sebagai alat untuk untuk mengetahui apakah variabel atau data yang dianalisis terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara untuk mengenali uji normalitas. Seperti Analisis grafis atau statistik Chi-Square, Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk, Jarque Bera, dll. Dalam penelitian ini, diagram P-P normal digunakan. Data dianggap normal jika tersebar di sekitar dan sepanjang diagonal, atau jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi

2. Uji heteroskedasitas

Menurut Wardani (2020) uji heteroskedasitas merupakan uji untuk mengetahui apakah ada penyimpangan heteroskedasitas pada syarat uji klasik pada regresi linear. Maksudnya, apakah pada uji ini terdapat kesamaan atau ketidaksamaan variance dan residual antar pengamat. Caranya dengan uji glejser jika (Sig.) >0,05 tidak adanya gejala Heteroskedasitas dan sebaliknya jika (Sig.) <0,05 maka terdapat gejala Heteroskedasitas.

3. Uji autokorelasi

untuk mengetahui hubungan antara kesalahan penghambat selama periode pengamatan dan sebelum pengamatan digunakan uji autokorelasi. Oleh karena itu, jika terjadi interferensi, dianggap sebagai masalah autokorelasi. Untuk nilai dimana dikatakan tidak ada autokorelasi adalah :

$$DW = \frac{D_u}{D + DUD} < 4$$

3.6.1.4 Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018), penelitian dengan variabel bebas berganda menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4 Koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase total variabel dependen dalam variabel independen. *Adjusted R-squared* digunakan dalam analisis regresi berganda. Pengelompokan koefisien korelasi yang tidak tergantung arah adalah:

| | | |
|----|-----------|--------------------|
| 1. | 0 | Tidak ada korelasi |
| 2. | 0-0,49 | Korelasi lemah |
| 3. | 0,50 | Korelasi Moderat |
| 4. | 0,51-0,99 | Korelasi Kuat |
| 5. | 1,00 | Korelasi Sempurna |

3.6.1.5 Uji Hipotesis

1. Pengujian parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016), Uji-t dilakukan untuk menguji pengaruh parsial antara variabel independen yang memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis = Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran (X3) dan penilaian kinerja (X4) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Hipotesis = Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran (X3) dan penilaian kinerja (X4) berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah.

Apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05 H_0 ditolak Jika probabilitas $< 0,05$

H_0 diterima

2. Pengujian simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) untuk mengetahui adakah pengaruh secara simultan antara variabel independen atau bebas terhadap variabel dependennya dilakukan Uji F. signifikansi Uji F SENDIRI adalah 0,05.

Hipotesis = Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran (X3) dan penilaian kinerja (X4) secara bersamaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis = Rencana Anggaran(X1), Eksekusi Anggaran(X2), pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran(X3) dan penilaian kinerja(X4) secara bersamaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel(Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

H_0 ditolak jika probabilitas $> 0,05$. Jika $0,05$, H_0 diterima.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

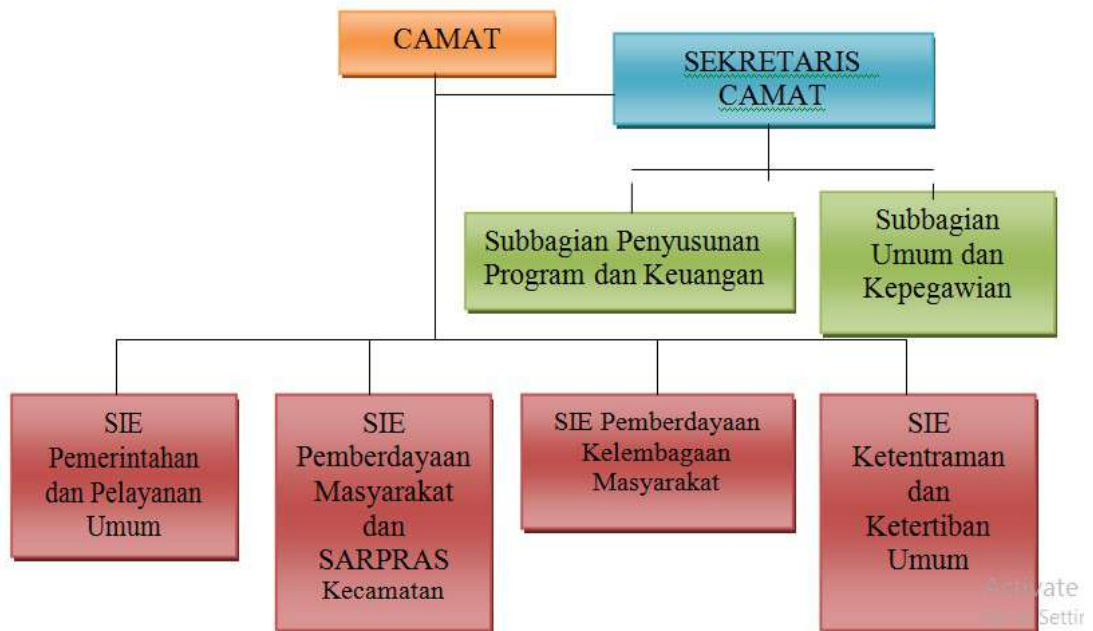
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Gadingrejo merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kota Pasuruan, provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah populasi penduduk 45,581 Jiwa dan luas wilayah 10,53 km^2 . Yang terdiri dari 8 Kelurahan, diantaranya adalah kelurahan gadingrejo, krapyakrejo, sebani, Bukir, Petahunan, Randusari, Gentong, dan Karangketug.

4.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo

4.1.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan



Sumber: Lampiran Perwali Kota Pasuruan Nomor 78 (2016) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Renstra 2022 Kecamatan Gadingrejo.

4.1.1.2 Tugas dan Fungsi

1. Camat

Tugas umum camat adalah:

1. Koordinasi kegiatan penguatan masyarakat
2. Koordinasi untuk keamanan ketertiban umum
3. Mengkoordinasi pengupayaan dalam memelihara Sarpras di lingkungan Kecamatan
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kelurahan
6. Memberikan pelayanan publik sebagai bagian dari tugas atau pelayanan yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris camat memiliki fungsi utama seperti urusan umum, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan kepegawaian. Tanggung jawab utama sekcam adalah membantu camat dalam mengarahkan, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, peralatan, manajemen keuangan, hubungan masyarakat, informasi administrasi dan tugas-tugas lainnya.

3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin seorang Kasubbag.

Adapun tugas pokok yang dilaksanakan oleh subbagian ini adalah :

1. Membuat perencanaan, melaksanakan, melakukan evaluasi serta membuat laporan akan tugas pelayanan dan melakukan koordinasi dalam penysusunan rencana program kerja Kecamatan.
2. Membuat perencanaan akan program kerja operasional kegiatan
3. Mengelola administrasi dan bertanggungjawabkan aktivitas keuangan Kecamatan
4. Mengumpulkan bahan anggaran Kecamatan
5. Mengelola administrasi keuangan anggaran, pendapatan, dan pembiayaan Kecamatan
6. Mengembangkan dan mengkoordinasikan jadwal gaji dan tunjangan lokal.
7. Melaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
8. Melaksanaan penilaian atas pelaksanaan tugas yang dilakukan
9. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dengan bagian lain di lingkungan Kecamatan

4. Subbagian Umum dan Kepegawian.

Adapun Tugas pokok yang dilakukan oleh Subbagian Umum Kepegawaian adalah melakukan perencanaan, melaksanakanya, melakukan evaluasi serta melakukan pelaporan akan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi umum, informasi networking serta kepegawaian di kecamatan Gadingrejo.

5.SIE Pemerintahan dan Pelayanan Umum

SIE Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang KASI. Adapun

tugas pokok yang dilaksanakan adalah

1. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan
2. Menyusun program dan kegiatan SIE pemerintahan Pelayanan Umum
3. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
4. Menyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan Pelayanan Umum

6. SIE Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan

Adapun tugas pokok yang dilakukan oleh seksi Pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana umum adalah serta Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan membantu melaksanakan tugas Camat dalam mengelola dan memelihara SARPRAS kecamatan.

7.SIE Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat (LPM)

Seksi ini memiliki tugas pokok Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan , menjembatani kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan LSM, serta melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

8.SIE Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peran utama Bagian Tamtib adalah membantu Camat dalam penyiapan bahan pembuatan kebijakan dan melaksanakan tugas Camat di bidang pelayanan dan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum.

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Gadingrejo

Visi

Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya,

dan harmoni warganya (Madinah).

Misi

Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

4.1.3 Sasaran dan Tujuan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gadingrejo

| No | Tujuan | Sasaran | Indeks Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke- | | | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat | | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan kecamatan | 81,88 | 82 | 82,40 | 83,50 | 84,26 | 85,53 |
| | | Meningkatnya pelayanan masyarakat | Prosentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi | 50 | 62,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indeks Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke- | | | | | |
|-----|--------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Prosentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| | | | standart | | | | | | |
| 2 | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat | Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang | | 75 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembangunan | Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |

Sumber : Kecamatan Gadingrejo (2022)

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Data yang diperoleh dikumpulkan dari responden langsung di lapangan yaitu, yaitu Kantor Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Bukir, Kelurahan Sebani, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, Kelurahan Petahunan, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Randusari dan Kelurahan Krapyakrejo. Proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 12 Juli hingga 23 Juli 2022, dari 21 Kuesioner yang dibagikan, semuanya diterima dengan kondisi yang baik. Responden terdiri dari Camat selaku (PA) Pengguna Anggaran, Bendahara Kecamatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola Barang dan

Jasa (PBJ), 8 Lurah Selaku (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran, dan bendahara pembantu (Kelurahan). Adapun karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

| Pengelompokan | | Frekuensi | Presentase |
|----------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | | 100% |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | 12 | 57,1% |
| | Perempuan | 9 | 42,9% |
| Pendidikan | Ekonomi | 13 | 62% |
| | Hukum | 3 | 14,3% |
| | Teknik | 0 | 0 |
| | Sosial | 1 | 4,8% |
| | Lainya | 4 | 19% |
| Jabatan | Camat | 1 | 4,8% |
| | Bendahara | 2 | 9,5% |
| | Lurah | 8 | 38% |
| | Bendahara Pembantu | 8 | 38% |
| | PPTK | 2 | 9,52% |
| Lama Bekerja | 1-5 Tahun | 15 | 71,4% |
| | 6-10 Tahun | 6 | 28,6% |
| | 10-15 Tahun | 0 | 0% |
| | 15-20 Tahun | 0 | 0% |
| | >20 Tahun | 0 | 0% |

a. Jenis Kelamin

Dari tabel diatas, diketahui responden laki-laki sebanyak 12 atau lebih banyak 57,1% dari perempuan yang berjumlah 9 atau 42, 9% dari seluruh kuesioner.

b. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan tabel diatas, kebanyakan latar pendidikan para responden adalah Ekonomi dengan presentase 62% atau sebanyak 13 orang, selanjutnya berlatar belakang pendidikan Hukum dengan sebanyak 3 orang atau 14,3%, untuk yang beerlar belakang pendidikan Teknik tidak ada, latar belakang Sosial 1

orang dengan presentase 4,8%, untuk pilihan lainya terdiri dari 4 orang yaitu berlatar belakang pendidikan Pertanian 1 orang dan SMA 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai sebagian besar ber pendidikan Ekonomi, sehingga diharapkan dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam bidangnya.

c. Jabatan

Berdasarkan table, diketahui kebanyakan responden adalah para KPA (Lurah) dan Bendahara pembantunya dengan jumlah masing-masing 8 Orang atau 38%. Camat 1 orang, PPTK Kecamatan dan Bendahara Kecamatan 2 Orang.

d. Lama Bekerja

Berdasarkan table tersebut, paling banyak lama bekerja responden yaitu selama 1-5 Tahun sebanyak 15 orang atau 71,4%, dan sisanya bekerja selama 6-10 tahun yaitu 4 orang atau 28,6%.

4.2.1 Deskripsi data variabel Anggaran Berbaris Kinerja

Pada penelitian ini digunakan 5 skala *likert* yaitu :

| Keterangan | (STS) | (TS) | (N) | (S) | (SS) |
|------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|
| | Sangat Tidak Setuju | Tidak Setuju | Netral | Setuju | Sangat Setuju |
| Skor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Skala ini digunakan untuk menganalisa data kuesioner responden terhadap (X1), (X2), (X3), (X4), Serta (Y). yaitu :

1. Rencana Anggaran (X1)

Tabel 4.3
Rencana Anggaran

| No. Pertanyaan | Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|-------------------|---------------------|---|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|--------|------|
| | STS | | TS | | R | | S | | SS | | | |
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | Resp | % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 6 | 29% | 14 | 67% | 21 | 100% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 48% | 11 | 52% | 21 | 100% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 29% | 15 | 71% | 21 | 100% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 29% | 15 | 71% | 21 | 100% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5% | 10 | 48% | 10 | 48% | 21 | 100% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14% | 8 | 38% | 10 | 48% | 21 | 100% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19% | 4 | 19% | 13 | 62% | 21 | 100% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10% | 8 | 38% | 11 | 52% | 21 | 100% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 9 | 43% | 11 | 52% | 21 | 100% |
| Presentase | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 6% | 67 | 35% | 110 | 58% | 21 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa untuk item pernyataan 1,2,3,4,6,7,8,9 kebanyakan responden memilih sangat setuju yang masing-masing secara berturut 67% responden sangat setuju Dokumen RPJMD menguraikan tentang visi, misi, serta program yang ingin dicapai. 52% responden memilih sangat setuju dokumen RKPd menjelaskan mengenai kerja yang terukur. 71% responden setuju sepenuhnya bahwa dokumen KUA berdasar kepada dokumen RKPd periode itu. 71% responden sangat setuju Rencana Anggaran dan SKPD menyusun RKA-SKPD sesuai prioritas dan PPAS. 48% responden menyatakan bahwa program dan kegiatan mereka sangat selaras dengan SKPD dan kinerjanya

sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. 62% responden sangat setuju bahwa prinsip nilai tambah efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKPD. 52% responden setuju sepenuhnya bahwa PPKD akan menyusun RKA-SKPD ke dalam Raperda APBD sebelum diajukan ke proses evaluasi, yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama. Lima puluh dua persen responden setuju sepenuhnya bahwa keputusan APBD perda dibuat setelah penilaian APBD.

Untuk item pernyataan lima kebanyakan 48% responden menjawab setuju jika dalam proses Penyusunan RKA-SKPD berdasar atas program dan kegiatan yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan Anggaran

Tabel 4.4
Eksekusi Anggaran

| No. Pertanyaan | Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|-------------------|---------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|--------|------|
| | STS | | TS | | R | | S | | SS | | | |
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | Resp | % |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14% | 9 | 43% | 9 | 43% | 21 | 100% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19% | 4 | 19% | 13 | 62% | 21 | 100% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14% | 10 | 48% | 8 | 38% | 21 | 100% |
| Presentase | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 16% | 23 | 37% | 30 | 48% | 21 | 100% |

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa untuk item pertanyaan nomor 1 dan 3 kebanyakan responden memilih setuju yang secara berturut-turut 43% responden setuju bahwa SKPD mengacu pada DPA dan rencana anggaran kas yang ditetapkan selama Eksekusi Anggaran. 62% responden setuju bahwa SKPD mengikuti prosedur pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran sesuai besaran yang dilaporkan dalam dokumen anggaran DPA dan Kementerian Keuangan.

Mengenai pertanyaan 2, sebagian besar responden sangat setuju bahwa Dokumen Anggaran Tunai (DAK) dan DPA PPTK digunakan sebagai pedoman pengalokasian dana ke SKPD. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Tabel 4.5
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

| No. Pertanyaan | Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|-------------------|---------------------|----|----|----|---|-----|----|-----|----|-----|--------|------|
| | STS | | TS | | R | | S | | SS | | Resp | % |
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 9 | 43% | 11 | 52% | 21 | 100% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 5 | 24% | 15 | 71% | 21 | 100% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10% | 13 | 62% | 6 | 29% | 21 | 100% |
| Presentase | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 6% | 27 | 43% | 32 | 51% | 21 | 100% |

Dari table 4.5 diketahui untuk item pertanyaan No. 1 dan 2 kebanyakan responden memilih sangat setuju yang secara berturut-turut 52% responden sangat setuju jika tiap tiap SKPD membuat laporan realisasi pengeluaran kas yang terjadi. 71% responden sangat setuju jika Laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP, dan isi dari laporanya antara lain Laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca, serta CALK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Untuk item pertanyaan no. 3 kebanyakan responden setuju jika Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan menerbitkan laporan untuk diperiksa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban

4. Penilaian kinerja

Tabel 4.6
Penilaian kinerja

| Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|---------------------|----|----|----|---|----|----|-----|----|-----|--------|------|
| STS | | TS | | R | | S | | SS | | Resp | % |
| F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 48% | 11 | 52% | 21 | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 10 | 48% | 10 | 48% | 21 | 100% |
| 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 20 | 48% | 21 | 50% | 21 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas diketahui untuk item pertanyaan No. 1 kebanyakan responden memilih sangat setuju bahwa dilakukanya Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.. Dan untuk item pertanyaan No. 2 kebanyakan responden memilih sangat setuju dan setuju dengan perolehan yang sama yakni 48% Responden setuju dan secara tegas menyetujui evaluasi yang dilakukan dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.22 Deskripsi data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 4.7
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

| No. Pertanyaan | Penilaian Responden | | | | | | | | | | Jumlah | |
|-------------------|---------------------|----|----|----|---|-----|----|-----|-----|-----|--------|------|
| | STS | | TS | | R | | S | | SS | | Resp | % |
| | F | % | F | % | F | % | F | % | F | % | | |
| 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5% | 6 | 29% | 14 | 67% | 21 | 100% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 48% | 11 | 52% | 21 | 100% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 5 | 24% | 15 | 71% | 21 | 100% |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 9 | 43% | 11 | 52% | 21 | 100% |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 10% | 7 | 33% | 12 | 57% | 21 | 100% |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19% | 7 | 33% | 10 | 48% | 21 | 100% |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19% | 7 | 33% | 10 | 48% | 21 | 100% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10% | 7 | 33% | 12 | 57% | 21 | 100% |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5% | 7 | 33% | 13 | 62% | 21 | 100% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5% | 7 | 33% | 13 | 62% | 21 | 100% |
| Presentase | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1% | 72 | 38% | 121 | 64% | 21 | 103% |

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih “sangat setuju” untuk semua pertanyaan, atau 67% responden “sangat setuju” bahwa ada hubungan yang kuat antara pemberian layanan dan program serta kebijakan. Menunjukkan bahwa Responden memilih " sangat setuju". 52 persen responden sangat setuju bahwa memperjelas tujuan anggaran program harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan. 71% responden sangat setuju jika visi dan misi suatu program harus ditentukan oleh sebuah rencana strategis organisasi. 52% responden sangat setuju jika ukuran kinerja harus ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program. 57% responden sangat setuju bahwa analisis keuangan diselesaikan untuk setiap kegiatan atau program. 48% responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Laporkan kegiatan dan program yang telah Anda terapkan kepada manajer Anda. 48% responden setuju sepenuhnya bahwa program kursus akan ditinjau 57 persen responden sepenuhnya setuju bahwa Kinerja aktivitas dipantau menggunakan KPI atau metrik eksplisit untuk menilai keberhasilan aktivitas atau program. 62% responden setuju sepenuhnya bahwa kegiatan/program yang dirancang mempertimbangkan segala kebutuhan masyarakat. Tentang Bagian Nomor 10 62% responden setuju sepenuhnya jika LAKIP akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perencanaan sebuah program yang akan datang, serta akan dikeluarkan pada saat yang di tentukan .

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan seberapa otentik suatu tes. Dikatakan valid jika koefisien r-korelasi hitung lebih besar dari koefisien pada tabel dengan signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan 30 responden, tabel menerima 0,361. Berikut hasil uji validitasnya

Tabel 4.8
Rencana Anggaran (X1)

| Variabel | Item Pertanyaan | r Tabel | r Hitung | Hasil |
|---------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| Perencanaan Anggaran (X1) | X1.1 | 0,361 | 0,467 | Valid |
| | X1.2 | 0,361 | 0,533 | Valid |
| | X1.3 | 0,361 | 0,394 | Valid |
| | X1.4 | 0,361 | 0,412 | Valid |
| | X1.5 | 0,361 | 0,373 | Valid |
| | X1.6 | 0,361 | 0,476 | Valid |
| | X1.7 | 0,361 | 0,410 | Valid |
| | X1.8 | 0,361 | 0,394 | Valid |
| | X1.9 | 0,361 | 0,558 | Valid |

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dengan jumlah butir 9 pertanyaan bernilai positif dengan menunjukan r Hitung < r Tabel pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.9
Eksekusi Anggaran (X2)

| Variabel | Item Pertanyaan | r Tabel | r Hitung | Hasil |
|---------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| Pelaksanaan Anggaran (X2) | X2.1 | 0,361 | 0,362 | Valid |
| | X2.2 | 0,361 | 0,609 | Valid |
| | X2.3 | 0,361 | 0,662 | Valid |

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dengan jumlah butir 3 pertanyaan bernilai positif dengan menunjukan r Hitung < r Tabel pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.10
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3)

| Variabel | Item Pertanyaan | r Tabel | r Hitung | Hasil |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3) | X2.1 | 0,361 | 0,554 | Valid |
| | X2.2 | 0,361 | 0,546 | Valid |
| | X2.3 | 0,361 | 0,546 | Valid |

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dengan jumlah butir 3 pertanyaan bernilai positif dengan menunjukkan $r \text{ Hitung} < r \text{ Tabel}$ pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.11
Penilaian kinerja (X4)

| Variabel | Item Pertanyaan | r Tabel | r Hitung | Hasil |
|--------------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| Evaluasi Kinerja (X4) | X2.1 | 0,361 | 0,452 | Valid |
| | X2.2 | 0,361 | 0,367 | Valid |

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dengan jumlah butir 2 pertanyaan bernilai positif dengan menunjukkan $r \text{ Hitung} < r \text{ Tabel}$ pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.12
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

| Variabel | Item Pertanyaan | r Tabel | r Hitung | Hasil |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|
| Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) | Y1.1 | 0,361 | 0,552 | Valid |
| | Y1.2 | 0,361 | 0,618 | Valid |
| | Y1.3 | 0,361 | 0,594 | Valid |
| | Y1.4 | 0,361 | 0,575 | Valid |
| | Y1.5 | 0,361 | 0,468 | Valid |
| | Y1.6 | 0,361 | 0,712 | Valid |
| | Y1.7 | 0,361 | 0,457 | Valid |
| | Y1.8 | 0,361 | 0,442 | Valid |
| | Y1.9 | 0,361 | 0,458 | Valid |
| | Y1.10 | 0,361 | 0,598 | Valid |

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dengan jumlah butir 2 pertanyaan bernilai positif

dengan menunjukkan $r_{Hitung} < r_{Tabel}$ pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga data diatas valid.

2.Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan guna menunjukkan stabilitas satu skor dari suatu instrument itu. Disebut reliable jika nilai *alpha* > dari 0,60. Dan Jika *Cronbach's Alpha* semakin mendekati nilai angka 1 maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan internal pada realibilitasnya.

Tabel 4.13
Hasil uji Reliabilitas Rencana Anggaran (X1)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .686 | 9 |

Pada tabel diatas diketahui diatas *Cronbach's Alpha* sebesar $0,686 > 0,60$, sehingga reliabel

Tabel 4.14
Hasil uji Reliabilitas Eksekusi Anggaran (X2)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .621 | 3 |

Pada tabel diatas, *Cronbach's Alpha* sebesar $0,621 > 0,60$, sehingga reliable

Tabel 4.15
Hasil uji Reliabilitas Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .648 | 3 |

Pada tabel diatas *Cronbach's Alpha* sebesar $0,648 > 0,60$, sehingga reliable

Tabel 4.16
Hasil uji Reliabilitas Penilaian Kinerja (X4)

| Reliability Statistics | |
|-------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha ^a | N of Items |
| .612 | 2 |

Pada tabel diatas, *Cronbach's Alpha* sebesar $0,612 > 0,60$, sehingga reliable

Tabel 4.17
Hasil uji Reliabilitas Akuntabilitas Kinerja (Y)

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .717 | 10 |

Pada tabel diatas, *Cronbach's Alpha* sebesar $0,717 > 0,60$, sehingga reliable.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

untuk mengetahui variabel atau data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Namun, untuk nilai kurang dari 0,05, data tidak terdistribusi normal. Di bawah ini adalah hasil tes Kolmogorov-Smirnoff.:

Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas

| <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | <i>Unstandardized Residual</i> |
| N | | 20 |
| Normal Parameters ^{a,b} | <i>Mean</i> | -.0117590 |
| | <i>Std. Deviation</i> | 1.98694364 |
| | | |
| Most Extreme Differences | <i>Absolute</i> | .114 |
| | <i>Positive</i> | .114 |
| | <i>Negative</i> | -.097 |
| Test Statistic | | .114 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |
| <i>a. Test distribution is Normal.</i> | | |
| <i>b. Calculated from data.</i> | | |
| <i>c. Lilliefors Significance Correction.</i> | | |
| <i>d. This is a lower bound of the true significance.</i> | | |

Dari data diatas diketahui, nilai signifikasinsi $0,200 > 0,05$ yang artinya data pada penelitian normal dan tidak terjadi masalah normalitas.

2. Uji Heteroskedasitas

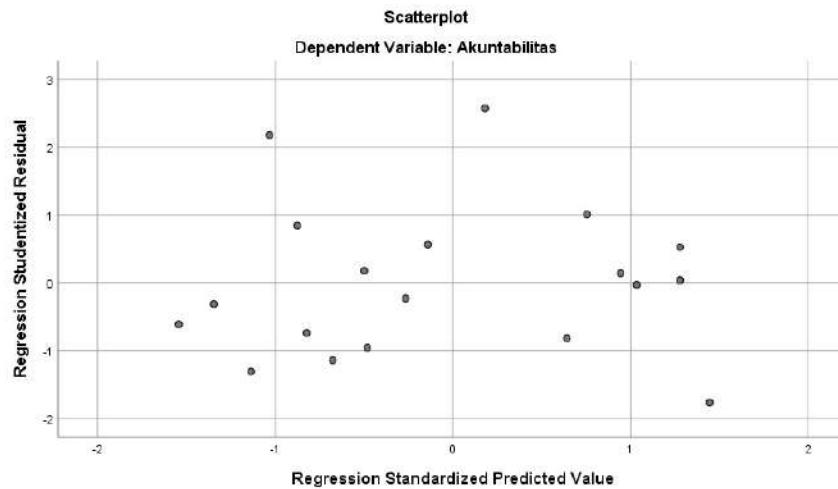
Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan/ketidaksamaan *variance* dan residual antar pengamat. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan memeriksa scatterplot antara SRESID dan ZPRED untuk pola tertentu.

a. Bila ada pola tertentu. B. Titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, mengembang, mengerut). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik di atas dan di bawah angka 0 menyebar pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Tabel 4.19

Hasil Uji Heteroskedasitas



Sumber : SPSS (2022)

Dari tabel tersebut, terlihat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka

0. Dan juga tidak terlihat pola tertentu pada sumbu Y, dengan begitu bias disimpulkan dengan metode ini tidak ada gejala heteroskedasitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan diantara kesalahan penghambat pada saat pengamatan dan pada saat sebelum pengamatan. Pada penelitian ini digunakan uji mode *Darbin Watson (DW)*. pada uji ini dikatakan tidak mengalami autokorelasi jika nilai $DW = Du < D < 4-DU$. Dibawah ini adalah hasil pengujian Autokorelasi pada penelitian ini :

Tabel 4.20
Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .784 ^a | .615 | .518 | 2.383 | 1.841 |
| a. Predictors: (Constant), Penilaian kinerja, Eksekusi Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Rencana Anggaran | | | | | |
| b. Dependent Variable: Akuntabilitas | | | | | |

Diketahui :

N=21

D= 1,841

Dl 0.8943

Du 1.8283

4-du = 4-1,8283 = 2,1717

DW = Du < D < 4-DU

= 1,8283 < 1,841 < 4-Du (2,1717)

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan maka data dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Autokorelasi.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dipakai untuk nilai pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 4.21
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 10.890 | 9.597 | | 2.135 | .053 |
| | PERENCANAN ANGGARAN | .577 | .223 | .218 | 2.241 | .033 |
| | EKSEKUSI ANGGARAN | 1.254 | .379 | .612 | 3.306 | .004 |
| | PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN | .908 | .438 | .107 | 2.703 | .021 |
| | PENILAIAN KINERJA | .595 | .604 | .071 | 2.288 | .032 |

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

koefisien regresi yang ada pada kolom B pada hasil analisa diatas, model regresi yang dapat disusun yaitu:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + b_3.x_3 + b_4.x_4$$

$$= 10,890 + 0,577x_1 + 1,254x_2 + 0,908x_3 + 0,595x_4$$

Nilai konstanta a memiliki nilai positif sebesar 10,890 . tanda positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini menandakan jika semua variabel independen yang meliputi Perencanaan Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3), Evaluasi Kinerja (X4) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 10,890.

1. B1 (X1) 0,577 = Variabel Rencana Anggaran(x1) berpengaruh positif akan variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan variable Rencana Anggaran maka akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,577, dengan anggapan bahwa variable yang lainya tidak diteliti pada penelitian ini.
2. B2 (X2) 1,254= Variabel (X2) Eksekusi Anggaran memiliki pengaruh akan variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan variable Pelaksanaan anggaran dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 1,254, dengan anggapan bahwa variable yang lainya tidak diteliti pada penelitian ini.

3. B3 (X3) 0,908= Variabel pelaporan anggaran atau pertanggung jawaban anggaran (X3) berpengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi (Y). apabila ada Peningkatan sebesar 1 dapat diartikan sebagai potensi dampak sebesar 0,908 terhadap akuntabilitas kinerja instansi, dengan asumsi tidak ada variabel lain yang dieksplorasi dalam penelitian ini.

4. B4 (X4) 0,595= Variabel (X4) Penilaian kinerja Anggaran berpengaruh positif akan variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat diartikan kenaikan 1 satuan variable Penilaian kinerja (X4) dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,595, dengan anggapan bahwa variable yang lainnya tidak diteliti pada penelitian ini.

4.3.4 Koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan perbandingan atau persentasi variabel variabel dependen yang diterangkan oleh variabel bebas atau variabel independenya. Dibawah ini adalah hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan pada penelitian ini :

Tabel 4.22
Hasil Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .824 ^a | .678 | .598 | 1.947 |

a. Predictors: (Constant), PENILAIAN KINERJA, PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN, PERENCANAN ANGGARAN, EKSEKUSI ANGGARAN

R Square $0,678 = 67,8 \%$

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square sebesar 0,678. Nilai ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau “R), yaitu $0,824 \times 0,824 = 0,678$. Besarnya angka koefisien determinansi 0,678 atau 67,8 % mengandung arti bahwa variabel X1,X2,X3,X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y sebesar 67,8 % sisanya sebesar 32,2% dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Adapun variabel lain yang tidak diteliti seperti Kontrol eksternal dan internal, Penghargaan/Hukuman, Kompetensi SKPD, dan lain-lain.

4.3.5 Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen. Apabila nilai Sig. $< 0,05$ atau thitung $> t_{table}$ terdapat pengaruh variable X akan variabel Y

Diketahui nilai Ttabel sebagai berikut :

$$T_{tabel} = t (a/2 ; n-k-1)$$

$$= t (0,025 ; 21-4-1)$$

$$T (0,025 ; 16)$$

$$= 2.119$$

Tabel 4.23

Hasil Uji t

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
|-------|---------------------------------------|------------|---------------------------|------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | | | | | | |
| | (Constant) | 10.890 | 9.597 | | 2.135 | .053 |
| | PERENCANAAN ANGGARAN | .577 | .223 | .218 | 2.241 | .033 |
| | EKSEKUSI ANGGARAN | 1.254 | .379 | .612 | 3.306 | .004 |
| | FELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN | .908 | .438 | .107 | 2.703 | .021 |
| | PENILAIAN KINERJA | .595 | .604 | .071 | 2.288 | .032 |

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Pengaruh X1 terhadap Y

Diketahui nilai sig. $0,033 < 0,05$ dan t_{hitung} sebesar $2,241 >$ nilai t_{Tabel} $2,119$, disimpulkan H1 Diterima, artinya variable (X1) Rencana Anggaran terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

2. Pengaruh X2 Terhadap Y

Dapat diketahui nilai sig. $0,004 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $3,306 >$ t_{Tabel} sebesar $2,119$, dapat ditarik kesimpulan jika H2 diterima, yang variabel (X2) Eksekusi Anggaran berpengaruh secara positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

3. Pengaruh X3 Terhadap Y

Dapat diketahui nilai sig. $0,021 < 0,05$ dan t_{hitung} sebesar $2,703 >$ nilai t_{Tabel} $2,119$, dapat ditarik kesimpulan jika terdapat pengaruh antara variabel (X3) akan variabel (Y)

4. Pengaruh X4 Terhadap Y

Diketahui nilai sig. $0,032 < 0,05$ serta t_{hitung} $2,288 >$ nilai t_{Tabel} sebesar $2,119$, dapat dapat diambil kesimpulan jika H4 diterima, artinya terdapat pengaruh

antara variabel (X4 terhadap (Y)

2. Uji F

Uji F (Simultan) ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $\text{sig.} < 0,05$ dan nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ artinya ada pengaruh terhadap variabel dependennya.

Diketahui perhitungan nilai F_{tabel} sebagai berikut :

$$F_{\text{tabel}} = F (K ; N-K)$$

$$F = (4 ; 21-4)$$

$$F = (4 ; 17)$$

$$F = 2,96$$

Tabel 4.24
Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 127.918 | 4 | 31.979 | 8.436 | .001 ^b |
| | Residual | 60.654 | 16 | 3.791 | | |
| | Total | 188.571 | 20 | | | |

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

b. Predictors: (Constant), PENILAIAN KINERJA, PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN, PERENCANAN ANGGARAN, EKSEKUSI ANGGARAN

Berdasarkan tabel tersebut, nilai $\text{sig.} 0,001 < 0,05$ dan $F_{\text{hitung}} 8,436 > f_{\text{Tabel}} 2,96$. Sehingga dapat disimpulkan Variabel X1,X2,X3,X4 secara bersama sama atau secara simultan berpengaruh terhadap Y.

a. Pembahasan

Dari hasil pengujian atau analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa

Rencana Anggaran (H1) mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Eksekusi Anggaran (H2) mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran (H3) mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian kinerja (H4) mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran, Penilaian kinerja (H5) secara bersamaam mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut hasil hipotesis pada penelitian ini

Tabel 4.25

Hipotesis

| Kode | Hipotesis | Hasil |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| H1 | Perencanaan Anggaran (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Diterima |
| H2 | Pelaksanaan Anggaran (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Diterima |
| H3 | Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran (X3) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Diterima |
| H4 | Evaluasi Anggaran (X4) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Diterima |
| H5 | Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Atau Pertanggungjawaban Anggaran, Penilaian kinerja Bersama-Sama berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Diterima |

1. Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari pengujian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa Rencana Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dibuktikan item pertanyaan Rencana Anggaran mencapai 56% responden sangat setuju dan 37% setuju, Rencana Anggaran disusun supaya aktivitas pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien serta tepat pada sasaran yang

ditetapkan.

2. Pengaruh Eksekusi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengujian menunjukkan Eksekusi Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dibuktikan dengan item pertanyaan variabel Eksekusi Anggaran sebesar 44% responden sangat setuju dan 35% responden setuju. Pengaruh Eksekusi Anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dinilai cukup pada lingkungan kecamatan Gadingrejo, karena pada kecamatan Gadingrejo dinilai pembagian kegiatannya telai sesuai dengan tupoksinya. Eksekusi Anggaranya pun dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dimana sebelum anggaran dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan dari PPTK. Dan Eksekusi Anggaran telah sesuai dengan Rencana Anggaranya, seperti halnya sasaran kegiatan yang sudah mencapai sesuai rencana, seperti yang tercantum pada capaian kinerja Kecamatan Gadingrejo yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Pratama Nst, S.E, M.Si dan Bagus Handoko, S.E, MSi (2018) “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar” yang menyatakan bahwa Pengaruh Eksekusi Anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah pada lingkungan Kecamatan Datuk Bandar bernilai Cukup atau Berpengaruh.

3. Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran mempunyai pengaruh secara parsial terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini bias diartikan jika semakin baik pelaporan atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kecamatan Gadingrejo sehingga telah mampu mengimplementasikan system anggaran berbasis kinerja yang baik,. Pelaporan atau Pertanggungjawaban terhadap Eksekusi Anggaran dilaksanakan secara periodik, dalam hal ini pelaporan keuangan dilakukan pada SIPD atau system Informasi Pemerintah Daerah yang berisi data pembangunan daerah, meskipun tidak melakukan pelaporan untuk masyarakat, Kecamatan Gadingrejo tetap mempunyai data dan data itu dilaporkan di SIPD. hasil penelitian ini sama halnya dengan yang dilakukan Rezky Septian (2021) dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Studi Kasus Pada SKPD Kab. Bogor” yang menyatakan bahwa Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

4. Pengaruh Penilaian kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari pengujian dapat diketahui, jika Penilaian kinerja mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Gadingrejo. Hal ini berarti Penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Gadingrejo telah mengaplikasikan system anggaran berbasis kinerja dengan baik. Pada Kecamatan Gadingrejo Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan atau kegagalan pada unit kerjanya, sehingga dapat diketahui tingkat realisasi, tingkat kemajuan serta kendala yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang sudah direncanakan, hal ini dapat diketahui pada pencapaian kinerja tahun 2021 pada Kecamatan Gadingrejo yang meningkat

disbanding tahun 2020. Hasil uji ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Raissa Aidintya Sembiring dan Ch. Heni Kurniawandengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada SKPD Kab. Magelang” yaitu, Penilaian kinerja yang dilakukan SKPD Kab. Magelang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengaruh Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran, dan Penilaian kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil dari uji f yang telah dilakukan adalah Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan Penilaian kinerja berpengaruh secara simultan akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dapat diartikan terdapat keterkaitan antara seluruh variabel independen terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau variabel dependen. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan/Pertanggungjawaban serta penilaian kinerja merupakan suatu kesatuan yang tak dapat di pisahkan satu sama lain agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Rezky Septian (2021) dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Studi Kasus Pada SKPD Kab. Bogor” menyatakan jika Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran, dan Penilaian kinerja secara bersamaan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari analisis dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini dapat penulis simpulkan :

1. Rencana Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H1) diterima.
2. Eksekusi Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H2) diterima.
3. Pelaporan/Pertanggungjawaban mempengaruhi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H3) diterima.
4. Penilaian kinerja mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H4) diterima.
5. Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran serta Penilaian kinerja secara bersama-sama mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H5) diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan waktu dan tenaga penelitian ini hanya dilakukan di lingkup kecamatan Gadingrejo sehingga populasi dan sample yang ditetapkan pun berjumlah sedikit.
2. Faktor kesibukan responden sehingga peneliti tidak bisa bertemu secara langsung dengan responden yang menyebabkan data yang dikumpulkan masih kurang.

5.3 Saran

Berikut saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah:

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap dengan cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sesungguhnya.

Dianjurkan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti pada obyek yang lain dengan skala yang lebih luas untuk mendapatkan populasi dan sampel yang lebih besar lagi. Dikarenakan penelitian ini sebesar 67,8% pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dan 32,2 % dipengaruhi variabel lain, maka bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lain seperti pengendalian internal, penghargaan/hukuman, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. *Al Furqan (67)*.

Al-Qur'an. *An-nisa ayat 58*.

Bachtiar Arif, M. d. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: kademia.

Batian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.

Instruksi Presiden No. 29. (2014).

Komang Sri Endrayani, d. (2014). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* .

Kurniati, S. d. (2019). TINJAUAN PERUBAHAN SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* .

Melfariza, N. A. (2014). PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BASED BUDGETING) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU. *Fairness* .

Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 15-25.

Peraturan Dalam Negeri No. 77. (2020).

Peraturan Pemerintah No. 78. (2018).

Rezeqiah, A. M. (2017). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJATERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProviosii Sumatera Selatan). *repository.um-palembang* .

Septiyan, R. (2021). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).

Sinambela, L. P. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Utomo, P. D. (2005). *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pop up design Yogyakarta.

Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung. *JurnalBisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(1).

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran I : Kuesioner

LEMBAR KUESIONER

Yth, para responden

Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Siti Khoiriyah
NIM : 18520048
Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi
Universitas : UIN Malang

Kuesioner ini merupakan proses pengumpulan data guna keperluan tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya berharap kepada Bapak/Ibu/Saudara/i agar berkenaan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan.

Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini..

Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan kuesioner ini. Atas kerjasama dan ketersediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, saya mengucapkan terima kasih.

Peneliti

Siti Khoiriyah

**KUESIONER
PENELITIAN**

A. Demografi Responden

Nama Instansi :
Nama Responden :
Tanggal Pengisian :
Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan

Latar Belakang Pendidikan :

Akuntansi
Ekonomi
Hukum
Sosial
Teknik
Lainya

Jabatan :

Camat
Lurah
Bendahara
Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie
Lainnya

Lama Bekerja:

1 – 5 tahun
6 – 10 tahun
11 – 15 tahun
16 – 20 tahun
≥ 21 tahun

Usia :

20 – 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
≥ 51 tahun

PERENCANAAN ANGGARAN (X1)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai. | | | | | |
| 2. RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya. | | | | | |
| 3. Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD pada periode tersebut. | | | | | |
| 4. SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD. | | | | | |
| 5. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA | | | | | |
| 6. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. | | | | | |
| 7. Dalam penyusunan RKA-SKPD, memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja. | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8. Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri. | | | | | |
| 9. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama sebelum diajukan dalam proses evaluasi. | | | | | |

PELAKSANAAN ANGGARAN (X2)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | ST S | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu kepada DPA dan Rencana Anggaran Kas yang telah ditetapkan. | | | | | |
| 2. Dokumen Anggaran Kas dan DPA digunakan oleh PPTK sebagai pedoman dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD. | | | | | |
| 3. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan Anggaran Kas. | | | | | |

PELAPORAN / PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (X3)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai pengeluaran kas yang terjadi. | | | | | |
| 2. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. | | | | | |
| 3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan untuk diperiksa dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. | | | | | |

EVALUASI KINERJA (X4)

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan. | | | | | |
| 2. evaluasi yang dilakukan berdasarkan dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. | | | | | |

**A. PERNYATAAN MENGENAI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (Y)**

| Pernyataan | Penilaian | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----|-----|
| | STS | TS | N | S | SS |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. | | | | | |
| 2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin | | | | | |
| 3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi. | | | | | |
| 4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program. | | | | | |
| 5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan. | | | | | |
| 6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. | | | | | |
| 7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program. | | | | | |
| 8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program. | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9. Kegiatan/ program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada pada masyarakat. | | | | | |
| 10.LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. | | | | | |

Lampiran : Surat Ijin Penelitian dari BAKESBANGPOL Kota Pasuruan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pasuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEI/RISET/PKL
NOMOR :072/799 /423.206/2022

Membaca : Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : B-238/FEK.1/PP.00 9/03/2022
Tanggal : 8 Maret 2022
Perihal : Ijin Penelitian / Magang / Riset / PKL / Observasi / KKN / PKL
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014
Dengan ini diijinkan untuk melakukan Survei / Penelitian / Riset/ PKL / Magang / PKL / Observasi kepada
Nama : Siti Khoiriyah
Nim : 18520048
Thema Survei/Riset/PKL : Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)
Sasaran Survei/Riset/PKL : Kecamatan Gadingrejo
Tanggal Survei/Riset/PKL : 8 Juni 2022 – 14 Juni 2022
Nama Penanggungjawab : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Survei/Riset/PKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL
3. Dilarang mengikut sertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada
4. Menantati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan kesopanan serta menghindari pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan penduduk.
5. Untuk mencegah penularan COVID-19, hendaknya tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat di lokasi Survei/Riset/PKL.
6. Selesai melakukan Survei/Riset/PKL, hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota Pasuruan Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan/data pengembangan Daerah.
7. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 8 Juni 2022

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Pasuruan (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Camat Gadingrejo
4. Arsip